

Antisipasi Arus Mudik, Diberlakukan Buka Tutup U-turn

SLEMAN (KR) - Wilayah Prambanan di perbatasan Sleman dan Klaten, berpotensi menjadi salah satu titik kemacetan selama arus mudik Lebaran. Mengantisipasi hal itu, Polresta Sleman telah menyiapkan manajemen arus lalu lintas. Kasat Lantas Polresta Sleman AKP Gunawan Setiyabudi menjelaskan, saat mudik Lebaran tahun ini, tol di Klaten Jateng akan difungsikan. Keberadaan tol itu, secara otomatis akan mempercepat jarak tempuh dari Klaten menuju wilayah Prambanan Sleman. "Adanya tol itu akan mempercepat waktu tiba dari Klaten ke Prambanan sekitar 30 menit, karena itu kita akan melakukan manajemen lalu lintas," jelasnya, Kamis (13/4). Tahun ini Polresta Sleman tidak akan mengalihkan arus dari timur (Klaten) menuju Yogya, akan dilakukan dengan cara menutup u-turn atau jalan putar balik. "Kami tidak akan melaksanakan penyesuaian yang masuk Yogya diarahkan ke kiri, namun akan kami tarik ke barat (masuk Kota Yogya). Kemudian untuk menghindari perlambatan arus, secara situasional kami akan menutup u-turn Kanisius. Dengan demikian akan memperlancar arus lalu lintas ke arah Yogya," terangnya. **(Ayu)-f**

LAPORAN KEUANGAN PMI KABUPATEN SLEMAN	
PALANG MERAH INDONESIA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN SLEMAN LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2022	
KETERANGAN	31-DES-22 (Rp)
ASET LANCAR	
Kas dan Setara Kas	4.991.381.830,89
Piutang	898.755.000,00
Persediaan	221.802.231,00
Uang Muka	0,00
Jumlah Aset Lancar	6.111.939.061,89
ASET TIDAK LANCAR	
Bangunan 1	2.320.193.450,00
Bangunan 2	167.471.450,00
Bangunan 3	1.981.098.715,00
Bangunan Hemodialisa	1.706.350.520,00
Bangunan Klinik	140.000.000,00
Kendaraan	3.711.645.775,00
Mesin	504.143.000,00
Peralatan Kantor Markas	958.178.000,00
Peralatan Diklat	36.400.000,00
Bangunan UDD	178.958.025,00
Kendaraan UDD	98.500.000,00
Peralatan Kantor UDD	972.820.000,00
Peralatan Medis	3.831.524.000,00
Peralatan Hemo	42.150.000,00
Peralatan Klinik	71.170.000,00
Akumulasi Penyusutan	(9.838.683.295,00)
Nilai Buku	6.881.919.640,00
JUMLAH ASET	12.993.858.701,89
KEWAJIBAN JK PENDEK	
Hutang Biaya	-
Jml Kewajiban Jk Pendek	-
Aset Bersih	
Tidak Terikat	12.993.858.701,89
Terikat	-
Jumlah Aset Bersih	12.993.858.701,89
KEWAJIBAN & EKUITAS	12.993.858.701,89

LAPORAN AKTIVITAS			
KETERANGAN	TIDAK TERIKAT	TERIKAT	31-DES-22 (Rp)
PENDAPATAN	9.804.695.297,00	23.860.000,00	9.828.555.297,00
BEBAN OPERASIONAL	(6.218.067.251,00)	(23.860.000,00)	(6.241.927.251,00)
LABA (RUGI) KOTOR	3.586.628.046,00	-	3.586.628.046,00
BEBAN-BEBAN			
Beban administrasi dan Umum	(3.669.545.220,50)		(3.669.545.220,50)
LABA (RUGI) SEBELUM POS LUAR USAHA	(82.917.174,50)	-	(82.917.174,50)
PENDAPATAN (BEBAN) LUAR USAHA			
Pendapatan diluar Usaha	918.505.517,00		918.505.517,00
Beban diluar usaha	(254.296.002,61)		(254.296.002,61)
Jml Pendapatan (beban) Luar Usaha	664.209.514,39	-	664.209.514,39
PERUBAHAN ASET BERSIH	581.292.339,89	-	581.292.339,89
ASET BERSIH AWAL	12.412.566.362,00		12.412.566.362,00
ASET BERSIH AKHIR	12.993.858.701,89	-	12.993.858.701,89

NB: Laporan keuangan tersebut diatas sudah diaudit oleh KAP Inaresjz Kemalarwarta Nomor : 36/2.0705/AU.2/10/0381.4/I/III/2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).



Pengurus Kabupaten
PALANG MERAH INDONESIA
Kabupaten Sleman
Ketua,

Dr. H. Sunartono, MKes

PMI Sleman Peroleh WTP 8 Kali

SLEMAN (KR) - Pengelolaan keuangan dan aset Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sleman kembali memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari salah satu Kantor Akuntan Publik. Dengan demikian sampai saat ini, PMI Sleman sudah 8 kali berturut-turut meraih predikat WTP. "Bahkan dari pemeriksaan kami, WTP yang diraih PMI Sleman tahun anggaran 2022 lalu dengan grade tertinggi atau tanpa catatan. Buku laporan hasil penilaian tersebut sudah saya serahkan ke PMI Sleman," kata auditor Akuntan Publik Inaresjz Kemalarwarta. Sementara Ketua PMI Sleman Dr dr Sunartono **(KR)-Istimewa**



Sunartono memperlihatkan hasil audit laporan keuangan PMI Sleman.

MKes, Kamis (13/4) mengatakan, meski PMI itu merupakan lembaga sosial, namun audit pengelolaan keuangannya dinilai sangat perlu. Sebab, dana yang dikelola PMI Sleman sebagian besar memang berasal dari masyarakat. Antara lain perolehan dari aksi Bulan Dana, serta bantuan dari berbagai pihak yang tidak mengikat. "Baik dana yang dipergunakan untuk operasional maupun untuk biaya lainnya, sebagian besar berasal dari masyarakat. Sehingga pengurus PMI Sleman memiliki tanggung jawab moral untuk mempertanggungjawabkan ke publik," kata Sunartono yang juga mantan Sekda Sleman tersebut. **(Has)-f**

OPTIK MELAWAI

BUY 1 GET 1 FREE

FOR EYEWEAR



mandiri



opmel.link/skr12140423

• Periode : 14 April - 4 Mei 2023

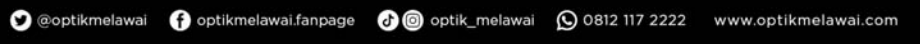
• Syarat & ketentuan berlaku



0% cicilan

Hemat hingga 35% dengan **live poin**

Bank Mandiri Berizin dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan



@optikmelawai optikmelawai.fanpage optik_melawai 0812 117 2222 www.optikmelawai.com



DPRD KABUPATEN SLEMAN
SUARA WAKIL RAKYAT

Jl. Parasmya, Tridadi, Sleman, DIY Kode Pos 55511. Telp.(0274)868413, Fax (0274)868413

KINERJA KOMISI D DPRD KABUPATEN SLEMAN

Usulkan Persentase Jalur Afirmasi Ditambah



Muh Zuhdan SPd MAP

SLEMAN (KR) - Dalam rangka mewujudkan hak yang sama terkait akses dan mutu pendidikan kepada siswa kurang mampu, pemerintah telah membuat kebijakan jalur afirmasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Namun ternyata saat ini, masih banyak siswa tidak mampu sekolah swasta. Untuk itu, Komisi D DPRD Sleman akan mengusulkan agar persentase jalur afirmasi di-

tambah.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Sleman Muh Zuhdan SPd MAP mengatakan, berdasarkan data di lapangan, sekarang ini masih banyak siswa kurang mampu tidak sekolah di negeri. Sehingga siswa kurang mampu sekolah di swasta. Padahal pemerintah telah membuat kebijakan jalur afirmasi bagi siswa kurang mampu untuk masuk di sekolah negeri.

"Kami masih menemukan siswa kurang mampu sekolah di swasta, otomatis masih ada biaya yang dikeluarkan. Berbeda kalau sekolah negeri, sudah tidak ada biaya lagi," kata Zuhdan, Kamis (13/4).

Dikatakan, alasan tidak sekolah negeri, ada yang memang tidak diterima karena kuota jalur afirmasi sudah penuh. Untuk itu, pihaknya akan mengusulkan persentase jalur afirmasi di

Kabupaten Sleman ditambah lagi. "Nanti kami akan komunikasikan dengan eksekutif supaya persentase ditambah. Tujuannya supaya semua siswa kurang mampu dapat sekolah di negeri," terang anggota Fraksi PKS ini.

Sementara jika ada siswa kurang mampu sekolah di swasta dan membutuhkan biaya, pemerintah mempunyai program Jaring

Pengaman Sosial (JPS). Dimana program JPS ini dapat untuk membiayai pendidikan yang nilainya mencapai jutaan rupiah. "Bagi masyarakat kurang mampu yang kesulitan membayar SPP, bisa mengajukan JPS. Bahkan program ini tidak hanya terbatas Rp 750.000 atau Rp 1 juta per tahun. Tapi jumlahnya bisa lebih dari itu," ujar Zuhdan.

Menurut Zuhdan, program JPS masih kurang tersosialisasi di masyarakat. Mengingat masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui program tersebut. Bahkan tidak hanya sebatas warga Sleman yang sekolah di Sleman, namun bisa warga Sleman yang sekolah di luar Sleman. "Program ini ternyata banyak yang belum tahu. Makanya ini perlu disosialisasikan ke masyarakat supaya penyerapan anggaran JPS bisa maksimal," ucap warga Rewulu Wetan Sidokarto Godean ini.

Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Sleman Banudoyo Manggolo SKom membenarkan, program JPS ini memang belum banyak diketahui oleh masyarakat. Bahkan beberapa waktu yang lalu, dirinya pernah di undang menjadi narasumber di SMP wilayah Pakem untuk diminta menjelaskan program JPS.

"Ternyata benar, masih banyak yang belum mengetahui program JPS. Dan ternyata program ini disambut positif masyarakat. Artinya ini perlu disosialisasikan ke masyarakat secara masif," katanya.

Untuk sektor pendidikan, program JPS ini dapat digunakan membayar tunggakan SPP, ijazah ditahan dan biaya kuliah. Tak hanya itu, JPS juga bisa untuk



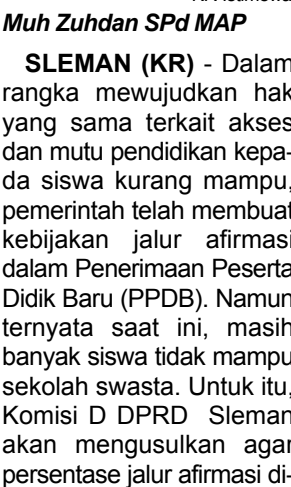
Banudoyo Manggolo SKom

mengakses alat bantu kesehatan seperti kursi roda, alat bantu dengar, biaya pengobatan dan lainnya.

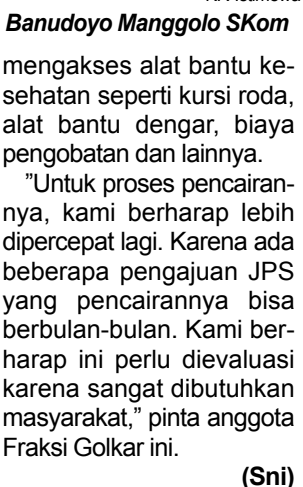
"Untuk proses pencairannya, kami berharap lebih dipercepat lagi. Karena ada beberapa pengajuan JPS yang pencairannya bisa berbulan-bulan. Kami berharap ini perlu dievaluasi karena sangat dibutuhkan masyarakat," pinta anggota Fraksi Golkar ini.



Komis D saat melakukan kunjungan kerja di daerah lain.



Muh Zuhdan SPd MAP



Banudoyo Manggolo SKom

(Sni)